

KAJIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KESEJAHTERAAN NEGARA DI INDONESIA

Tukino

Jurusan Marketing Communication, Fakultas Ekonomi dan Komunikasi,
Universitas Bina Nusantara,
Jln. Kemanggisan Ilir III No. 45, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat

ABSTRACT

The goal of the article was to remind the state authorities in order to realize that Indonesia was set up aiming for the welfare of the people. Qualitative research was conducted. Data obtained from literature studies and field observations. The analytical method used was descriptive analysis. The results indicate that Indonesia are often far from people's expectations. Authorities, especially of late just thinking about state power without thinking about the lives of the people in general. Indeed, attention to the people of Indonesia by a regime that ever existed up and down sometimes. However, in recent times with the number of cases that exist in the country of Indonesia plus the slogan 'the autopilot' illustrates that the country further and further away from the people themselves. Therefore, the need for Indonesia to return the State Government to be more focused on the welfare of the people widely in the framework towards the welfare state because that is true the goals of Indonesia country was built.

Keywords: *state welfare, people welfare*

ABSTRAK

Artikel bertujuan mengingatkan pemerintah agar menyadari bahwa Indonesia didirikan bagi kesejahteraan rakyat. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari studi literatur dan observasi, dengan menerapkan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan Indonesia kadang jauh dari harapan rakyat. Penguasa, terutama pengusaha terdahulu, hanya berpikir tentang kekuasaan negara tanpa mempedulikan kehidupan rakyat. Perhatian pemerintah terhadap rakyat kadang naik dan kadang turun. Dengan adanya slogan "autopilot" menunjukkan bahwa negara semakin jauh dengan rakyat. Oleh sebab itu, kesadaran bahwa pemerintah harus fokus pada kesejahteraan rakyat diperlukan, sehingga mampu memenuhi tujuan didirikannya negara.

Kata kunci: *kesejahteraan rakyat, kesejahteraan negara*

PENDAHULUAN

Sejak awal abad ke 19 sebagian besar negara mengarah ke bentuk negara kesejahteraan (*welfarestate*). Negara kesejahteraan menekankan bahwa fungsi negara yang paling mendasar adalah mensejahterakan rakyatnya. Akibat dari hal seperti itu hampir semua negara dunia ini termasuk Indonesia berupaya keras memikirkan dan mengupayakan kesejahteraan bagi semua rakyatnya. Pemerintah negara Indonesia berupaya keras untuk mensejahterakan rakyat. Meskipun upaya keras dilakukan Pemerintah namun 'bayang-bayang' kegagalan selalu hadir bahkan bukan hanya sekedar bayang-bayang dalam kenyataannyapun negara Indonesia belum bisa dikatakan berhasil dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Kajian negara kesejahteraan ini merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Permasalahan kesejahteraan rakyat sebagai negara kesejahteraan perlu mendapat kajian yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa permasalahan kesejahteraan negara perlu diupayakan jalan keluarnya atau solusinya bagi kepentingan semua pihak terutama bagi yang sedang berkuasa. Memikirkan kesejahteraan rakyat Indonesia sebenarnya bukan sebatas dipikirkan tetapi juga dicarikan solusinya. Oleh karena itu, penelitian berkaitan dengan masalah negara kesejahteraan di Indonesia ini perlu dilakukan dan bertujuan antara; pertama, untuk menjelaskan fungsi dan tujuan kekuasaan dibangun dalam negara kesejahteraan terutama di abad 20 ini, kedua, menjelaskan praktik negara kesejahteraan di Indonesia dari rejim ke rejim, yang ketiga; mencari solusi terhadap negara kesejahteraan yang ada di Indonesia.

METODE

Penelitian negara Kesejahteraan dan kesejahteraan negara ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan (*literatur*). Di samping studi pustaka, dilakukan observasi terhadap para demonstran yang ada di depan gedung DPR/MPR yang pada intinya menyoroti ketidakhadiran negara dalam beberapa kasus dalam kehidupan bernegara. Hal ini menarik bagi penulis terutama dengan ditambah beberapa slogan 'Indonesia sebagai negeri *Autopilot*' yang terdapat di beberapa tempat baik di Jakarta maupun di beberapa daerah lain. Penelitian ini juga dianalisis secara mendalam dengan analisis kualitatif.

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan agar semua pihak dalam negara ini terutama penguasa (rejim) agar lebih memperhatikan kesejahteraan bagi rakyatnya, pola berpikir yang hanya memikirkan penguasa sendiri perlu disesuaikan dengan keinginan rakyat dan tentunya harus selalu diarahkan dalam kerangka demi untuk kesejahteraan rakyat. Penguasa yang hanya memikirkan kekuasaan itu terutama bagi elit negara itu sendiri sebenarnya lupa akan makna, tujuan dan fungsi dari negara didirikan. Tujuan dan cita-cita negara republik Indonesia sudah ditegaskan dalam UUD 1945 alinea ke 4. Sedangkan manfaat penelitian ini bagi warganegara (rakyat) adalah rakyat perlu lebih peduli dan aktif secara konstruktif mengkritisi jalannya negara agar senantiasa mengarah pada kesejahteraan rakyat dan bukannya 'hanya' mengarah kesatu arah kesejahteraan negara.

PEMBAHASAN

Tujuan dan cita-cita negara Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 adalah: pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan dan cita-cita negara Indonesia tersebut bukanlah sesuatu yang sulit diwujudkan tetapi sangat mungkin diwujudkan. Perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh bangsa Indonesia, dan khusus untuk pemerintah karena

diberi amanah dan amanat untuk memerintah maka wajib melakukan perlindungan semaksimal mungkin terhadap segenap bangsa Indonesia. Perlindungan terhadap rakyat Indonesia tidak boleh mengalami diskriminasi, tidak boleh dibedakan atas dasar ras, warna kulit dan atau pun alasan kaya dan miskin serta alasan apapun.

Kedua, Memajukan Kesejahteraan Umum. Tujuan atau cita-cita untuk memajukan kesejahteraan umum perlu menjadi alasan dasar serta arah bagi upaya pembangunan bangsa Indonesia. Dalam konsep kesejahteraan umum kedudukan rakyat Indonesia bukanlah objek semata untuk mendapatkan keuntungan bagi pemerintah dan akhirnya pada negara (sudut pandang APBN) tetapi rakyat sesungguhnya disamping objek hendaknya juga sekaligus sebagai subjek pembangunan (sasaran pembangunan). Rejim yang berkuasa idealnya mengutamakan kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia.

Dalam UUD 1945 Pasal 33 berbunyi; Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Menariknya selama ini pasal tersebut yang sudah jelas bunyinya namun dalam pelaksanaannya tidak jelas. Simak saja di jalan-jalan, diperempatan dan masih banyak tempat lain masih banyak terdapat anak-anak terlantar, tidak mendapat perhatian serius dan terkesan dibiarkan. Memang pasal itu sendiri dapat mengandung multitafsir terutama kata-kata fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kata “dipelihara” sebenarnya membingungkan, apakah aparat pemerintah mengartikan “dipelihara” itu dibiarkan atau kata tersebut berarti diatasi atau dicarikan jalan keluar yang memang kewajiban dari pemerintah dan sekaligus sejalan dengan tujuan negara Indonesia? Dalam praktiknya kata “dipelihara” tersebut mengarah ke pembiaran dan yang lebih negatif lagi justru menjadi sasaran proyek pengentasan kemiskinan.

Ada banyak rakyat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial serupa termasuk orang miskin, orang yang sudah tua dan pengangguran yang kurang mendapat perhatian dan penanganan serius dari pemerintah. Yang nampak justru pemerintah dan negara hadir tetapi kehadirannya justru ‘nampak’ sibuk mengurus kepentingan dan keuntungan sendiri terutama bagi aparat pemerintah tersebut padahal pada hakikatnya pemerintah negara ada karena untuk meningkatkan kesejahteraan umum, bukankah aparat pemerintah itu dalam konsep modern juga sebagai Publik service, sehingga ada kesan pemerintah kehilangan fungsi yang mendasar tersebut. Akibat lebih lanjut karena Pemerintah yang merupakan kepanjangan tangan dari negara tidak dapat hadir sebagai mana fungsi dan perannya mengakibatkan rakyat mengurus dengan caranya sendiri.

Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa mengandung dimensi yang sangat luas. Menciptakan orang pintar dan pandai memang harus tetapi yang lebih luas dari itu adalah bagaimana menciptakan rakyat Indonesia yang cerdas bukanlah merupakan hal yang mudah. Pintar dan pandai secara pengetahuan (*cognitive*) perlu ditambah dengan kecerdasan hidup dan keluhuran Budi. Akan sangat bagus bila selain aspek *cognitive* perlu juga afektif (sikap) dan *psikomotorik* (yang dilakukan/yang diwujudkan). Dengan bahasa yang lebih modern dan canggih kepintaran secara otak kanan (pengetahuan dan wawasan/cognitif) perlu disertai pula dengan kecakapan hidup yang baik (otak kiri). Kecerdasan perlu mengandung kemampuan secara *hardskill* tetapi juga *softskill*. Ketinggian *Intelektual Quantum* (IQ) harus pula disertai dengan *Emosional Quantum* (EQ) dan juga yang tidak perlu ditinggalkan *Spiritual Quantum* (SQ). Bila itu semua terwujud maka manusia Indonesia yang seutuhnya, cerdas dan sejahteraan akan terwujud.

Mengenai IQ, EQ dan ESQ yang berkaitan dengan kesuksesan dunia akhirat, berikut ini cuplikan dari pendapat Ary Ginanjar Agustin :

Meminjam istilah Dr Ali Sri Shariati, seorang intelektual muslim, yang mengatakan bahwa: Manusia adalah makhluk dua dimensi yang membutuhkan penyelarasan kebutuhan akan kepentingan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, manusia harus memiliki konsep duniawi atau kepekaan emosi serta intelegensi yang baik (EQ dan IQ) dan penting pula penguasaan ruhiah vertikal atau *Spiritual Quontient* (SQ).

Merujuk pada aspek bidimensional itulah, saya mengusung upaya penggabungan ketiga konsep tersebut, yang dalam prosesnya melewati segenab perenungan yang panjang, hingga pada akhirnya terjadi penggabungan ketiganyadalam bentuk ESQ (*Emosional Spritual Quantum*),....

Lebih lanjut menurut Ary Ginanjar A, telah banyak terbukti bahwa kecerdasan emosi memiliki peran yang lebih signifikan dibanding dengan kecerdasan Intelektual (IQ). Kecerdasan Otak (IQ) barulah sebatas syarat minimal meraih keberhasilan, namun kecerdasan emosilah yang sesungguhnya mengantarkan seseorang menuju puncak prestasi. Banyak orang dengan kecerdasan intelektual yang tinggi, terpuruk dalam persaingan. Sebaliknya banyak yang mempunyai kecerdasan intelektual biasa-biasa saja, justru sukses menjadi bintang, pengusaha-pengusaha sukses dan pemimpin-pemimpin yang disegani. Disinilah membuktikan Begitu pentingnya kecerdasan Intelektual, kecerdasan Emosional, lalu dimana posisi ESQ ?

Posisi ESQ tampil menjawab permasalahan kekosongan jiwa. ESQ sebagai sebuah metode dan konsep yang jelas dan pasti adalah jawaban dari kekosongan batin dan jiwa. ESQ merupakan konsep universal yang mengantarkan seseorang pada predikat memuaskan bagi dirinya dan sesama. Bila IQ, SQ dan ESQ dapat berjalan menyeluruh dan seimbang maka akan tercipta keberhasilan yang berdasarkan kecerdasan, mencapai sukses dan bahagia dunia akhirat.

Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan, cita-cita bangsa Indonesia untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan Internasional atau forum level dunia merupakan tujuan yang luhur. Indonesia telah banyak terlibat dalam forum Internasional, sebagai contoh Keterlibatan di PBB, Di ASEAN, Upaya menyelamatkan TKI dari Hukuman Pancung di Arab Saudi, Upaya Menolong Imigran Gelap yang tenggelam di Perairan selatan Situbondo beberapa waktu yang lalu, mengirim pasukan Perdamaian ke Libanon, dan berbagai misi Internasional lainnya.

Keterlibatan secara aktif tersebut perlu dilandasi dan diselingkan dengan cita-cita menyejahterakan rakyat, mencerdaskan segenab bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Keempat tujuan, cita-cita bangsa Indonesia tersebut perlu dilaksanakan secara bersama-sama dan berkesinambungan tidak bisa satu tujuan atau cita-cita dipisahkan atau dilepaskan dengan tujuan atau cita-cita yang lainnya. Dengan demikian tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia tersebut perlu dilaksanakan secara menyeluruh, simultan dan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Pembangunan Nasional : Siklus Perkembangan Rejim

Pembangunan Nasional yang dilakukan semua Rejim di Indonesia secara umum dibagi 3 tahap. Dalam kategori pertama biasanya rejim awal selalu menjanjikan kesejahteraan (kemakmuran) bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam tahap pertama ini rejim sangat pro rakyat, peduli rakyat dan empati kepada rakyat. Setiap aktivitas dari pemerintahan negara sejalan dengan keinginan rakyat bahkan dapat dikatakan full dukungan rakyat. Kondisi seperti itu dialami hampir semua rejim di Indonesia dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Gusdur maupun Megawati. Pada masa awal Soekarno berkuasa apalagi dalam peristiwa lapangan Ikada, masyarakat Indonesia, Jepang dan duniapun tercengang bagaimana seorang Soekarno dapat mengundang begitu banyak rakyat Indonesia untuk datang ke Lapangan Ikada (Monas) dengan antusias. Dalam masa Soeharto awalpun sebagian besar rakyat bangga dan menjunjung tinggi Soeharto sebagai sosok yang luar biasa.

Fase kedua atau siklus Tengah, dalam masa tengah ini, hampir semua rejim sudah mulai mengalami 'pembusukan dari dalam', menjauhi rakyat dan mendekati Pengusaha dan pemilik modal. Dekat dengan pengusaha dan pemilik Kapital dan kurang mendengar rakyat, rejimpun mulai

mengambil jarak dengan rakyat dan mesra dengan pengusaha pemilik modal/kapital. Dalam masa tengah ini, hampir semua aparat pemerintah mengikuti pola aparat negara mendekati pengusaha atau pemilik modal. Akibat siklus kedua atau masa tengah ini penderitaan bagi rakyat karena berada pada pihak yang selalu disalahkan dan dikalahkan dalam semua kepentingan dan urusan, hukum pun memihak ke yang membayar, keadilan dapat dibeli dan berbagai masalah lainnya sampai ke tingkat paling bawah juga demikian. Rakyat menjadi pihak yang menderita dan dirugikan tetapi akan selalu berhadapan dengan aparat yang selalu memperhitungkan keuntungan (kapital). Dalam masalah keuntungan ini yang dapat menjanjikan dan memberikan hanya para pemilik modal (kapital), pemilik usaha (pengusaha) sedangkan rakyat ditinggalkan.

Fase atau bagian terakhir (siklus terakhir), mulai mendekati rakyat kembali tetapi tidak bisa jauh dari pengusaha/pemilik modal. Rakyat diperlukan apalagi untuk legitimasi dukungan bagi penguasa yang ingin mencalonkan kembali. Bagi rejim yang tidak mencalonkan kembali sibuk mempersiapkan pertanggungjawaban.

Kesejahteraan Rakyat dari Rejim ke Rejim

Rejim Orde Lama: Masa Mencari Keseimbangan sebagai sebuah Negara Baru

Sebagai negara yang baru saja memproklamasikan diri, sebagai negara Indonesia merdeka maka banyak masalah. Keseimbangan politik dan ekonomi belum tercapai, dasar negara pun masih menjadi pertentangan yang mendasar dan belum menjadi kesepakatan. Pada masa rejim Soekarno, rakyat disibukan dengan upaya keras agar tidak kembali dijajah, walaupun berapapun harus dibayar termasuk jiwa dan raga. Masa awal Soekarno ini banyak terjadi pengorbanan diakibatkan oleh berbagai konflik dan peperangan, baik perang kemerdekaan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan yang sudah didapat. Tetapi bukan hanya itu banyak perang lain yaitu perang untuk membuat negara stabil karena banyak pemberontakan yang diawali dengan ketidakpuasan dan memaksakan pendapat atau keinginan.

Rejim Soekarno, tidak begitu nampak konsep kebijakan kesejahteraan yang pro rakyat. Kondisi tersebut bukan tanpa alasan karena semua perhatian tertuju pada upaya agar negara baru Indonesia tetap terjaga dan tidak kembali dijajah. Kondisi rakyat yang secara mayoritas miskin, tidak sejahtera hampir terlupakan karena ganasnya perang kemerdekaan. Kondisi seperti itu dalam benak rakyat Indonesia jauh lebih baik daripada jatuh lagi ketangan penjajah. Kedudukan dan program pemerintah serta kabinet pun belum tertata dengan baik. Kesejahteraan rakyat menjadi domain rakyat sendiri, dan sebagai negara baru Indonesia jelas tidak berfokus pada hal kesejahteraan rakyat.

Namun pada periode akhir rejim Soekarno bagian akhir (akhir) terdapat perkembangan yang menarik. Terutama ketika ekonomi mulai bergeliat. Soekarno mengalami tekanan ekonomi terutama ketika terjadi inflasi yang tinggi, kesulitan ekonomi sebagai akibat investasi asing, dan harga kebutuhan dasar yang meningkat tajam ditambah lagi rejim Soekarno juga mendapat sorotan yang tajam terhadap segala bentuk penyimpangan terutama terhadap pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Tuntutan yang bertubi-tubi dari rakyat tersebut berujung pada tuntutan terhadap pertanggungjawaban Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi. Akhir dari tuntutan tersebut Soekarno jatuh.

Dengan demikian rejim Soekarno jatuh karena faktor ekonomi yang umum, terutama ketika dihadapkan dengan berbagai permasalahan ekonomi. Konsep kesejahteraan rakyat, program pembangunan yang pro rakyat menyatu dalam diri Soekarno itu sendiri, dan Soekarno sendiri menyatu dengan rakyat, maka ada istilah pemimpin besar revolusi, Soekarno adalah penyambung lidah rakyat.

Rejim Orde Baru: Ekonomi Rakyat, Program Pembangunan yang Merakyat Mengemuka

Kekuasaan Rejim Soeharto membawa pengalaman sejarah yang menarik. Terjadi perimbangan kekuasaan antara kekuasaan sebagai Presiden dan sebagai wakil dari kesejahteraan rakyatnya. Kekuasaan yang dibangun juga sangat dekat dengan rakyat, banyak kegiatan dimana Soeharto turun langsung ke rakyat bawah. Soeharto sendiri menekankan kestabilan politik demi untuk pembangunan ekonomi dan akhirnya untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam konsep kesejahteraan rakyat masa Soeharto sangat terasa. Program Pembangunan Nasional yang berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinyatakan dengan tegas, ekonomi yang dibangun di Indonesia perlu mengembangkan ekonomi yang berdiri pada kemampuan bangsa sendiri. Pada masa Soeharto untuk merealisasi amanat Pancasila dan GBHN tersebut maka dibangunlah negara Indonesia ini dengan arsitek yang memang mengarah ke Ekonomi pro rakyat. Masa itu dikenal dengan istilah Ekonomi Kerakyatan seperti yang dikemukakan Arsiteknya Orde Baru Prof. Soemitro Joyo Hadikusumo.

Konsep ekonomi kerakyatan membawa cerita yang harum waktu itu, rakyat bahkan sampai Orde Sesudahnya memandang dalam hal penciptaan kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat masa Soeharto jauh lebih bagus. Hal yang menarik konsep ekonomi kerakyatan tersebut dikembangkan sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Soeharto juga menegaskan Soko Guru Perekonomian Indonesia waktu itu yaitu Koperasi. Oleh karena itu, pada masa Soeharto banyak Koperasi Berkembang pesat, didesa-desa ada Koperasi unit Desa (KUD), dikantor-kantor terdapat Koperasi dan hampir merata pula diseluruh Indonesia terdapat Koperasi.

Pemerintahan Soeharto menekankan Pembangunan pada aspek ekonomi rakyat, kesejahteraan rakyat. Pembangunan yang digalakanpun bertitiktekan pada rakyat itu sendiri. Program lainnya seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), pengentasan dan pengendalian kemiskinan dan sebagainya jelas dibuat dan didesain untuk rakyat.

Pada waktu menjelang akhir rejim Soeharto memang didera masalah yang sama dengan Orde Sebelumnya yaitu diwarnai dengan 'Pembusukan dari dalam' berupa penyakit Korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN). Penyakit KKN yang kronis disemua bidang membuat rejim Soeharto kehilangan legitimasi dan dukungan rakyat. Disamping itu kekuasaan yang dibangun oleh Soeharto sangat lama lebih dari 32 tahun. Akibatnya permasalahan yang rumit yang berujung krisis di hampir semua sektor baik politik, ekonomi, budaya, sosial dan pertahanan keamanan yang tidak dapat diatasi mengakibatkan Soeharto jatuh.

Rejim Orde Reformasi : Masa Trubulansi Politik, Rejim B.J. Habibie, Abdurahman Wahid dan Megawati

Masa Rejim B.J. Habibie, Abdurahman Wahid dan Megawati dapat dikatakan sebagai masa trubulansi(ketidakjelasan dan ketidakpastian) semua bidang terutama politik. Rejim Habibie sendiri sebenarnya merupakan masa antara Soeharto dengan Pemilu yang dipercepat. Banyak sebagian rakyat Indonesia mengidolakan B.J. Habibie sebagai Presiden yang akan mampu mengatasi berbagai masalah yang ada di Indonesia waktu itu. B.J. Habibie juga mengemukakan konsep masyarakat madani, yaitu masyarakat sipil yang maju, kuat dan modern.

Konsep masyarakat madani sendiri sebenarnya juga mirip dengan gaya Soeharto yaitu dalam rangka memperkuat masyarakat (rakyat) sipil agar dapat berperan serta dalam pembangunan secara optimal. Konsep masyarakat madani adalah dalam rangka memberdayakan rakyat dengan secara optimal menjadi berdaya dan berguna serta menjadi modern. Konsep tersebut diacungi jempol sebagai konsep yang brilian dan maju. Maju karena berfokus pada pemberdayaan rakyat itu sendiri. Karena Rejim Habibie berkuasa tidak lama maka konsep yang bagus tersebut tidak dapat terprogram dan

dilaksanakan secara tuntas, namun pada masa berikutnya konsep masyarakat sipil yang demokratis, maju dan modern (masyarakat madani) tetap menjadi bahan kajian yang berlanjut dan perlu.

Rejim Habibie sendiri, disamping mengeluarkan kebijakan yang prokesejahteraan rakyat(program pro rakyat) walaupun tidak bisa dijalankan secara penuh juga mendapat ganjalan serius terutama dalam masalah Timor-timur. Pertanggungjawaban B.J. Habibie di depan Sidang Istimewa MPR tidak diterima karena masalah lepasnya Timor-Timur dari Republik Indonesia. Pada akhirnya B.J. Habibie harus mengakhiri kekuasaannya sebagai Presiden Republik Indonesia (RI).

Masa berikutnya adalah masa Presiden Abdurrahman Wahid atau akrab dipanggil Gusdur. Gusdur menjadi Presiden karena dukungan salahsatunya adalah poros tengah yang digagas Amien Rais. Banyak program Rejim Gusdur tetapi kurang tercermin secara nyata ditengah-tengah masyarakat. Yang menarik dari rejim Gusdur adalah gaya kepemimpinan, dan asal Gusdur yang berasal dari Pondok Pesantren menjadi kekuatan utama dukungan rakyat pada rejim ini. Mengenai kebijakan pembangunan yang pro rakyat tidak tergambar dengan jelas. Yang nampak jelas dari diri Gusdur seperti juga yang tercermin dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah 'membela yang benar'. Konsep 'membela yang benar' itulah yang menjadi magnet bagi dukungan rakyat ke Gusdur.

Gusdur sendiri memegang kekuasaan tidak sampai selesai. Gusdur diberhentikan ditengah jalan karena mirip seperti dengan yang dialami oleh B.J. Habibie yaitu pertanggungjawaban Gusdur dalam masalah skandal Bulog tidak diterima oleh MPR dalam Sidang Istimewa (SI) MPR. Pada akhirnya Gusdur harus mengakhiri jabatannya karena mandatnya ditarik kembali.

Hal yang tidak jauh berbeda dengan Rejim Gusdur dalam kebijakan pembangunan yang pro rakyat adalah Rejim Megawati Soekarnoputri. Rejim Megawati juga tidak tampak melukan kebijakan pembangunan yang mengedepankan kesejahteraan rakyat. Megawati mendapat sokongan dari rakyat karena disamping sebagai keturunan Soekarno juga partainya PDI P mendeklarasikan diri sebagai paratinya wong cilik. Mengenai program pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan rakyat, rejim Megawati tidak begitu nampak. Yang nampak dari rejim Megawati itu adalah penjualan banyak BUMN ke pihak asing. Mengenai program yang pro rakyat dalam pembangunan rejim ini tidak nampak.

Rejim Orde reformasi : Rejim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Rejim SBY terkenal dengan konsep kesantunan dan pencitraan. Pada awal berkuasa sosok SBY yang sangat santun dan bersahaja membuat banyak orang mendukungnya dalam suatu barisan Partai Demokrat (PD). Dukungan yang begitu kuat sebenarnya juga diakibatkan kondisi masyarakat sebelumnya yang diwarnai berbagai gejolak, seperti kebebasan yang kebablasan, demokrasi yang melupakan penegakan hukum, masa euphoria politik dan hal lainnya. Akibat kondisi demikian maka masyarakat seolah-olah memerlukan orang yang bisa menjawab permasalahan sebelumnya tersebut. Disitulah sosok SBY menemukan tempat yang pas, dan sesuai harapan sebagian rakyat Indonesia.

Dalam konsep pembangunan masa SBY sebenarnya mengarahkan Indonesia menjadi bentuk mini dari negara Amerika. Mungkin karena latarbelakang pendidikan dipengaruhi oleh Pendidikan gaya Amerika atau mungkin karena tertanam kuat konsep-konsep pembangunan ekonomi gaya Amerika. Dalam masa SBY jargon-jargon ekonomi kerakyatan, kesejahteraan rakyat dan program-program pro rakyat seperti yang digalakan masa Soeharto mulai samar-samar kelihatan bahkan lambat laun menghilang. Konsep pembangunan lebih mengarah pada ekonomi liberal gaya barat. Akibat berikutnya diperkenalkan konsep-konsep barat yang berakibat pada kapitalisme dan individualisme yang semakin merebak, tidak ada lagi konsep kesejahteraan dan kegiatan yang pro rakyat. APBN terus ditingkatkan, pendapatan negara terus digenjot (dinaikan), gaji Pegawai selalu ditinjau ulang, kalangan Usaha, Investasi 'dimanjakan' dengan berbagai regulasi yang terpenting menambah pendapatan negara akibatnya disisi rakyat menjadi korban. Rakyat hidup pada dunianya sendiri terlepas negara

yang juga hanya memikirkan urusannya sendiri. Pada masa SBY sebenarnya tidak ada jargon-jargon Pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, ekonomi rakyat, dan lain sebagainya..akibatnya negara kaya rakyat miskin...

Rakyat Miskin, Negara(Pemerintah) Kaya?

Dalam Diskusi di Balai Sudirman, terdapat topik Autopilot yang akhir-akhir ini menghangat. Tema tersebut menarik untuk dicermati sebagai fenomena kehidupan bernegara Indonesia. Dalam diskusi tersebut, diulas kondisi Indonesia saat ini dimana rakyat berjalan sendiri seolah-olah negara tidak ada, terjadi 'persilingkuan' antara pengusaha dengan elit-elit kapitalis sehingga mengakibatkan rakyat selalu dipihak yang dikalahkan.

Permasalahan apa yang terjadi di Papua terutama berkaitan dengan PT. Freeport, Kasus Mesuji Lampung dan masih banyak kasus lainnya yang serupa, dan yang terakhir kasus di Aceh menjelang Pemilu akan nampak mengindikasikan hadirnya fenomena tersebut. Yang menarik perhatian publik keterlibatan aparat dalam banyak kasus cenderung berpihak pada penguasa, Pengusaha dan kapitalis sehingga sulit dibayangkan rakyat semakin merana. Hal tersebut semakin 'menggeliskan'. Akar dari permasalahan tersebut ternyata aparat Pemerintah yang ada ternyata mendapat keuntungan dari Perusahaan tersebut. Dalam kasus PT Freeport ternyata Aparat TNI dan Polri memang mendapat tambahan biaya pengamanan dari PT tersebut yang jumlahnya milyaran rupiah. Pola demikian terjadi pula di hampir semua daerah konflik.

Konflik pertanahan dan kepemilikan lainnya selain melibatkan Aparat Pemerintah, Polri dan TNI yang kurang netral dan tidak berfungsi sebagai pihak tengah juga ditambah lagi pengamanan tambahan swasta. Pengamanan tambahan swasta tersebut bila diluar kontrol dan 'terlalu liar' semakin menimbulkan ketidakpastian dan semakin menderitakan rakyat pada taraf yang memprihatinkan, ujung-ujungnya rakyat menjadi korban dan 'tumbal' dalam kondisi tersebut.

Istilah 'centeng-centeng' (bisa pula disebut sebagai pengamanan Partikelir) sebagai pihak pengamanan tambahan bagi Pihak perusahaan, disatu sisi menciptakan rasa aman bagi perusahaan dan pengusaha serta kapitalis pemilik modal tetapi disisi lain 'menggilas' rakyat yang tidak berdaya justru menjadi korban. Istilah centeng sendiri sebenarnya berkaitan dengan orang-orang yang dibayar baik secara langsung atau sembunyi-sembunyi untuk melindungi kepentingan Perusahaan. Orang-orang tersebut bisa dari orang biasa dan 'dapatpula berasal dari oknum aparat'. Dalam situasi demikian kondisi rakyat menjadi daerah membara dan menyakitkan bagi rakyat.

Disisi Anggaran negara, Postur APBN 2011 terdiri dari pendapatan negara dan Hibah sebesar Rp. 1.086.4 Trilyun dan Belanja Negara sebesar Rp. 1.202 Trilyun terdapat defisit Rp. 115.7 Trilyun (17 % PDB). Belanja infrastruktur tahun 2010 sebesar Rp 110.1 trilyun, tahun 2011 sebesar Rp. 139.4 Trilyun meningkat Rp. 115.7 Trilyun. Untuk APBN tahun 2012 mencapai Rp.1435 Trilyun, dari sejumlah itu Rp 900 trilyun untuk Belanja Pemerintah Pusat dan Rp. 450 trilyun untuk transfers daerah. Dalam pengucuran Anggaran Negara tersebut diperkirakan 30 % dihabiskan untuk para 'calo anggaran' dan untuk transfers daerah diduga kuat juga dananya mengalir kepusat kembali.

Sedangkan, jika dilihat dari sektor BUMN, jaman orde Lama dan baru BUMN menggali uang dengan lebih mengarah dan berfokus untuk kesejahteraan rakyat namun periode sekarang menggali uang untuk negara tetapi peruntukannya 'justru untuk memperkaya negara' dengan kata lain BUMN yang ada sekarang ini diduga sebagai alat untuk memperkaya negara dan sebagai ATM partai politik. Gaji aparat Pemerintah terus dinaikan sehingga 'menguras' separoh lebih Anggaran bahkan di beberapa Daerah justru sebagian besar anggaran dihabiskan untuk belanja pegawai. Ironisnya anggaran untuk sektor yang mengarah ke rakyat dan kesejahteraan rakyat sangat kecil.

Dilihat dari kebijakan pertanahan, terhadap Demo sebagian kecil rakyat Indonesia didepan Gedung Parlemen di awal 2012 menuntut agar tercipta keadilan terutama dalam Bidang Pertanahan (Agraria). Tuntutan tersebut terjadi karena penguasaan Tanah oleh Perusahaan berakibat pengurangan bahkan mengakibatkan kehilangan kesejahteraan. Disisi lain dari banyak kasus serupa yang ada di Indonesia menuntut keterlibatan aparat keamanan yang ada entah Polisi, tentara (posisi membantu polisi) ataupun Pemerintah. Keterlibatan tersebut harusnya membela dan melindungi rakyat tetapi kenyataannya justru berpihak pada pemilik modal (Tuan tanah, Pemilik Perusahaan). Keberpihakan pada pemilik Perusahaan dan modal tersebut membikin citra aparat pemerintah dan negara kehilangan roh keadilan. Yang menarik ada tulisan 'Pemerintah Kaya, Rakyat Miskin'. Tulisan tersebut mewakili apa yang sesungguhnya terjadi dari rangkaian peristiwa yang ada, bahkan terkesan merupakan jeritan rakyat. Demo itu sendiri sampai tulisan ini dibuat masih menginab didepan gedung Parlemen tersebut. Demo didepan DPR MPR yang menuntut pengembalian tanah yang diambil oleh Perusahaan telah beberapa hari menginab didepan gedung tersebut.

SIMPULAN

Konsep negara kesejahteraan (welfarestate) berkembang pesat mulai abad ke 19. Konsep tersebut sebenarnya merupakan reaksi balik dari masa sebelumnya dimana penguasa, elit bangsawan adalah yang sejahtera mengenai rakyatnya hampir tidak perlu diperhatikan dan memang bukan merupakan urusan dari penguasa negara atau kerajaan. Namun, konsep yang awalnya dirancang untuk memfokuskan kesejahteraan pada rakyat dalam pelaksanaannya tidaklah semudah konsepnya.

Mengenai konsep yang membahas kesejahteraan rakyat merupakan konsep yang perlu dikaji secara lebih mendalam di Indonesia. Hampir semua rejim yang pernah ada di Indonesia dari Orde Lama, Orde Baru maupun Orde Reformasi terdapat penekanan tentang kesejahteraan rakyat yang berbeda. Setiap rejim dalam membahas dan menjalankan konsep kesejahteraan rakyat dan program pro rakyat secara umum dapat dibagi menjadi 3 bagian (paro) waktu; bagian pertama; sepertiga awal rejim awal berkuasa bisa dibilang rejim memerlukan dukungan rakyat. Dalam kondisi seperti ini rejim dekat dan membuat program pro rakyat.

Bagian kedua, waktu tengah rejim yang berkuasa mulai mengambil jarak, tidak terlalu dekat dengan rakyat dan terkadang menjauh, mulai menghitung untung rugi rejim yang ada tersebut. Dalam keadaan ini, kedekatan dengan rakyat mulai samar-samar, kedekatan dengan kelompok strategis menguntungkan termasuk pengusaha lebih didekati dan disanjung-sanjung. Kelompok pengusaha, elit strategis lebih mengutamakan dalam segala sisi apalagi bila rejim mau mencalonkan untuk periode berikutnya. Kedekatan dengan rakyat semata-mata untuk kepentingan legitimasi umum. Kondisi rakyat yang memprihatinkan dan menyusahkan cenderung untuk dihindari, rejim cukup reaktif dan defensif terhadap rakyat tetapi membina hubungan baik dengan elit strategis dan pengusaha perlu ditekankan dan harmonis untuk menghitung kalkulasi politik. Pada siklus kedua ini, penguasa mulai menghitung untungnya jadi penguasa (rejim).

Bagian ketiga, rejim yang berkuasa sudah mulai lagi menengok rakyat sekedar untuk kepentingan strategis terutama bila ia inginkan berkuasa kembali. Hubungan dengan penguasa dan pengusaha perlu dijalin erat tetapi rakyat juga perlu diperhatikan. Rejim yang berkuasa dalam taraf ini, mulai mengetahui segala hal yang telah diperbuat, terutama yang merasa kurang terutama berkaitan dengan apa yang telah diprogramkan. Disamping itu, mulai agak gugup dan kuatir dengan masalah pertanggungjawaban. Untuk yang sedang berkuasa kalau dia seorang negarawan maka akan dapat berjalan mulus mengakhiri kekuasaannya, tetapi bagi yang terlalu politisi, dan melakukan kesalahan maka masa akhir ini akan berubah pada situasi yang menyulit. Fase bagaian ketiga, siklus ketiga dari sebuah rejim memang tidak mudah, tetapi siapaun yang berkuasa pada akhirnya akan bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan.

Rejim Soekarno disibukan dengan upaya stabilisasi dalam bidang politik yang tentunya diharapkan akhirnya terjadi stabilisasi dalam bidang ekonomi. Rejim Soekarno disibukan dengan banyaknya pemberontakan didalam negeri dan upaya melepaskan bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajah secara seratus persen. Rejim Soekarno ini sebenarnya berupaya keras mencari bentuk sebagai sebuah negara, topik dan tema pembangunan yang pro rakyat, kesejahteraan rakyat sangat minim. Hal tersebut bisa dimengerti karena memang negara Indonesia waktu itu belum berimbang dan baru mencari titik keseimbangan.

Penguasa di Indonesia, yang secara umum lebih konsen dan serius menangani konsep kesejahteraan rakyat tersebut sebenarnya adalah rejim Orde Baru dibawah Soeharto. Dalam strategi Pembangunan Nasional, rejim Soeharto banyak sekali jargon berkaitan dengan kesejahteraan rakyat yang dikedepankan. Pembangunan yang digalakan oleh Soeharto berdasarkan pada aspek kesejahteraan rakyat, ekonomi rakyat, koperasi, Inpres desa tertinggal, transmigrasi dan masih banyak lainnya program yang pro kesejahteraan rakyat.

Beda dengan rejim Soeharto, rejim Habibie hanya secara singkat berkuasa. Habibie mengeluarkan konsep masyarakat madani walaupun belum begitu tuntas dilaksanakan. Rejim Megawati juga dapat dikatakan memiliki program yang pro rakyat yang kurang. Yang menarik perhatian publik secara umum dari rejim Megawati adalah Megawati anak Pemimpin Besar Revolusi Soekarno dan PDIP mendeklarasi sebagai Partai wong cilik, namun mengenai program kesejahteraan rakyat, program pro rakyat sayup-sayup terdengar dan nampak kurang jelas terprogram. Demikianpula dengan Abdurrahman Wahid (Gusdur) yang disegani, belum banyak berbuat banyak bagi rakyat karena kekuasaannya sangat singkat, dan berhenti ditengah jalan. Ketika Gusdur berkuasa tidak begitu nampak program pro rakyat, sebagaimana dengan Partai kebangkitan Bangsa (PKB) ada jargon yang menarik 'membela yang benar' merupakan motor kuat dukungan rakyat pada rejim ini, terutama karena dilatarbelakangi rejim sebelumnya yang tidak begitu nampak mana yang benar dan mana yang tidak benar. Yang terakhir adalah Pemerintahan Rejim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kekejaman, kesopanan, kesantunan mengedepan sebagai jargon politik utama. Yang menarik pembangunan pada rejim SBY lebih nampak dari atas, tidak terdapat program-program yang mengedepankan kesejahteraan rakyat secara masal. Pada rejim SBY ini memang pembangunan adalah untuk rakyat tetapi program pro rakyat tetap dimensi pemerintah atau negara yang mengemuka. Tidak ada program seperti masa Soeharto, ekonomi Kerakyatan, Koperasi dan lainsebagainya.

Rejim SBY disibukan dengan kebijakan pembangunan yang pro 'sibuk dengan urusan sendiri', sibuk dengan pendapatan negara, disibukan dengan menaikkan gaji Pegawai, dan sebagainya. Terdapat program KUR dan PNPM mandiri dan program lainnya seperti pembagian Gas gratis tetapi program yang berdimensi dan berbobot penanganannya bagi, oleh dan rakyat sendiri sangat minim. Yang nampak gaya pemerintah SBY dan pembangunan Nasional yang dilaksanakan adalah bergaya negara para pegawai dan 'negara kaya sedangkan rakyatnya miskin?!'.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi yusran, Husnu Abadi (edit), Demokrasi Pembangunan dan Kesejahteraan sosial, Pekanbaru: Red PoST, 2008.
- Ary Ginanjar Agustin, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan emosional dan Spiritual ESQ, Jakarta: Arga Wijaya Persada, 2001.
- E.Koswara Kertapradja, Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi dan kemandirian daerah. Penerbit: PT Candi Cipta Pramuda, 2002

George Junus Aditjondro. Membedah Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi di Indonesia, Investigasi Korupsi Sistemik Bagi Aktivis dan Wartawan. Jakarta: LSPP, 2004.

Hertati, Dkk. Materi Pokok Ilmu Sosial Budaya Dasar. Penerbit: Universitas terbuka, 2010

Jousairi Hasbullah, Sosial Kapital(menuju keunggulan Manusia Indonesia), Jakarta: MR United Press, 2006

Michael Rush & Philip Althoff. Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002

Muhammad Ray Akbar, Mengapa Harus Korupsi?. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009.

Tan Malaka, Gerpolek, Yogyakarta: Narasi, 2011

UUD 1945 Amandemen Pertama-keempat. Jakarta: Setia Kawan, terbitan ke 2 tahun 2005

Mass Media

Kompas, tanggal 11 Januari 2012

Media Indonesia, tanggal 13 Januari 2012.

Web//internet

www.anggaran.depkeu.go.id

<http://Pelita.Politik.com/new>

Program Komisi Anda, Radio Eshinta FM, *News And Talk*. Jakarta 12 01 2012.